PEMKOT YOGYA MINTA TAMBAHAN KUOTA SAMPAH

Khawatir Cepat Penuh, Pemda DIY Belum Setujui

YOGYA (KR) - Pengelolaan sampah masih menjadi fokus perhatian kabupaten/kota dan Pemda DIY. Kendati demikian Pemda DIY masih akan menahan (untuk menyetujui) sementara waktu terkait adanya permintaan penambahan kuota pembuangan sampah ke TPA Regional Piyungan dari Pemkot Yogyakarta.

Apabila penambahan kuota pembuangan sampah tersebut disetujui, dikhawatirkan belum sampai Maret TPA Piyungan sudah akan penuh. Padahal sejak dua bulan lalu Pemda DIY telah mengizinkan Pemkot memakai sebagian lahan di TPA Regional Piyungan untuk pengolahan sampah.

"Kalau soal permintaan penambahan kuota masih kami tahan dulu. Karena membutuhkan kecermatan dan mempertimbangkan situasi di lapangan. Kalau nanti penambahan kuota itu disetujui, nanti bagaimana dengan Sleman dan Bantul?" kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono di kantornya, Rabu (21/2).

Beny mengatakan, penanganan sampah di TPA Regional Piyungan maupun kabupaten/kota butuh penanganan cepat dan tepat. Untuk itu pihaknya mengingatkan kepada Pemkab/Pemkot yang menggunakan lahan di TPA Piyungan untuk bekerja cepat dan segera menyelesaikan persoalan sampah di wilayahnya. Terlebih pada Maret atau April mendatang rencana program desentralisasi sampah akan diberlakukan secara penuh. Dengan begitu tidak akan ada lagi pembuangan sampah ke TPA Piyungan.

"Kami selalu mendorong Pemkab/Pemkot yang memanfaatkan lahan di TPA Regional Piyungan, seperti Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogya untuk bekerja secara konkret. Terutama berkaitan dengan pengelolaan dan pengurangan sampah," ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) DIY Kusno Wibowo menyatakan, kuota sampah yang diberikan kepada Pemkot Yogya masih di angka 145 ton perhari. Kuota tersebut akan terus dievaluasi sampai desentralisasi benar-benar diberlakukan. Karena berdasarkan estimasi desentralisasi penuh nanti akan diterapkan pada Maret atau April. Mengingat untuk saat ini Zona Transisi 2 TPA Regional Piyungan sudah mendekati titik limit.

"Meski Pemkot Yogya sudah menerapkan berbagai upaya untuk menekan produksi sampah, namun hasilnya belum signifikan. Padahal harapan kami semakin lama setelah program atau gerakan itu dilakukan, kuota sampah di TPA Regional Piyungan bisa berkurang," terangnya. **(Ria)-f**

DUGAAN PELANGGARAN ETIK HAKIM MK

MKMK Mulai Klarifikasi Para Pelapor

JAKARTA (KR) - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar Rapat Majelis Kehormatan (RMK) untuk meminta klarifikasi kepada para pelapor terkait laporan mereka soal dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Rapat yang digelar di Lantai 4 Gedung Mahkamah Konstitusi tersebut berjalan selama kurang lebih 30 menit dan dilaksanakan secara tertutup. Hakim yang hadir adalah I Dewa Gede Palguna, Ridwan Mansyur, dan Yuliandri.

"Kami harus menyelenggarakan RMK untuk meminta klarifikasi kepada pelapor untuk menentukan apakah, menurut MKMK, laporan layak diteruskan ke tahap pemeriksaan atau tidak," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (21/2).

Beberapa pelapor yang dipanggil adalah advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Andi Rahadian dari Sahabat Konstitusi, serta Harjo Winoto dari Firma Hukum Rahnoto dan Rekan. Advokat Zico melaporkan dua hal kepada MKMK, yaitu terkait pernyataan mantan Ketua MK Anwar Usman dalam konferensi pers pada bulan November lalu. **(Ant/Has)-f**

Tingkatkan

Sambungan hal 1

"Haji Ramah Lansia pada aspek layanan sudah cukup baik. Ini berkaca dari penyelenggaraan haji 2023. Tapi mohon diperkuat programnya," terang Hilman Latief saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program Haji Ramah Lansia dan Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H di Bekasi, Rabu (21/2).

Hadir, Sekretaris Ditjen PHU Ahmad Abdullah, Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab, Direktur Bina Haji Arsad Hidayat, Diraktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, perwakilan dari Kementerian Kesehatan, TNI, BNPB, dan sejumlah pejabat Eselon III Ditjen PHU.

"Kita perlu mematangkan Program Haji Ramah Lansia mulai dari sebelum jemaah berangkat, saat mereka di Arab Saudi, serta saat kepulangan atau setelah berhaji," sambung Hilman.

Dikatakan Hilman, Haji Ramah Lansia menjadi perhatian Pemerintah seiring proyeksi masa depan jemaah haji yang lansianya akan terus bertambah. "Ini luar biasa. Baru setahun diterapkan dan direspons dengan baik. Ini menjadi catatan dari Menag untuk bisa terus dikembangkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk memperbaiki seluruh proses Haji Ramah Lansia, mulai dari filosofi, konsep dasar, program, dan layanan," sebut Hilman.

Selain penguatan program, Hilman juga menyinggung mitigasi risiko dan skenario kedaruratan penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M. Menurutnya, skenario kedaruratan perlu disiapkan sejak awal, termasuk upaya mengefektifkan komunikasi dalam memitigasi semua potensi persoalan.

"Kita perlu membangun akses dan relasi yang baik dangan Tim Saudi, termasuk keamanan. Jika memungkinkan menghadirkan Tim Kementerian Haji dalam pelatihan petugas haji agar mereka bisa menjelaskan situasi dan kebijakan di Saudi," sebut Hilman.

Kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000. Indonesia juga mendapat tambahan kuota 20.000 orang, sehingga totalnya 241.000 jemaah. Jumlah ini terdiri 213.320 jemaah haj reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Jemaah haji reguler tahun ini yang masuk kategori lansia dengan usia 65 tahun ke atas jumlahnya sekitar 45.000 orang. **(Ati)-d**

Hadi

Sambungan hal 1

Presiden menyampaikan pesan khusus kepada kedua menteri baru tersebut.

Kepada Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi berpesan untuk menjaga situasi politik dan keamanan di Tanah Air tetap kondusif. "Tadi saya sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia," kata Presiden usai pelantikan.

Presiden meyakini, dengan pengalaman sebagai Panglima TNI, Hadi sangat siap untuk menangani masalah polhukam di Tanah Air. "Saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat, sangat siap," tuturnya.

Kepada AHY, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pesan. Pertama, Presiden mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyelesaikan sertipikat tanah elektronik secara lebih masif. "Berkaitan dengan sertipikat elektronik harus didorong agar lebih masif," ujar Presiden.

Kedua, Kepala Negara meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon. "Target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk," ujarnya.

Terakhir, Presiden memerintahkan AHY untuk menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). "Yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan," pesannya.

Presiden pun meyakini, dengan rekam jejak dan latar belakang yang dimiliki, AHY mampu mengemban tugas sebagai Menteri ATR/Kepala BPN dengan baik. "Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat, beliau juga alumnus Akademi Militer (Akmil), juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University, saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR/BPN karena ini urusan manajemen, saya kira beliau sangat, akan sangat siap," tandas Presiden. **(Sim)-f**

Fokuskan

Sambungan hal 1

karena beras menjadi bahan baku dalam banyak produk makanan. Kenaikan biaya produksi ini kemudian dapat menyebabkan naiknya harga-harga lainnya, karena produsen akan menaikkan harga produk mereka untuk menutupi biaya tambahan.

Kenaikan harga beras, kata Azizah, akan berdampak pada kenaikan tingkat inflasi, mengingat beras merupakan salah satu komoditas pokok yang menyumbang 3 persen pada Indeks Harga Konsumen (IHK) yang digunakan untuk menghitung inflasi. Beras sudah sejak lama berkontribusi pada angka inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2023 menunjukkan beras sebagai komoditas penyumbang utama andil inflasi. Beras memiliki andil 0,18 persen dalam inflasi month to month, dan 0,55 persen dalam inflasi year on year. Komoditas satu ini kembali mengalami inflasi 0,64 persen (month-to-month/mtm) dengan andil inflasi 0,03 persen pada Januari 2024. **(Ant/San)-d**

Bawaslu

Sambungan hal 1

dan penggunaan hak pilih di TPS, kemurnian surat suara di TPS, dan kemurnian data hasil penghitungan suara di TPS pada Pemilu 2024," kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/2).

Lolly menjelaskan rekomendasi itu dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 80, 109, dan 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Permasalahan terbanyak yang menjadi penyebab dikeluarkannya rekomendasi tersebut adalah untuk mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik atau surat keterangan (suket), serta tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024.

"Terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang memilih tidak sesuai dengan domisilinya dan tidak mengurus pindah memilih, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali," jelasnya.

Lolly juga mengatakan alasan rekomendasi PSL adalah adanya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan rekomendasi PSS adalah karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, Lolly mengingatkan bahwa batas waktu pelaksanaan PSU, PSL, dan PSS adalah tanggal 24 Februari 2024. Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Terkait strategi pengawasan, Lolly mengatakan hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing serta ketentuan peraturan perundang-undangan, baik ketaatan prosedur, ketersediaan logistik, akurasi data, maupun ketentuan khusus mengenai prosedur PSU, PSL, dan PSS. **(Ant/Has)-f**

PDIP

Sambungan hal 1

Desakan itu sehubungan dengan hasil penghitungan perolehan suara pada alat bantu Sirekap yang terjadi secara nasional. Oleh karena itu, PDI Perjuangan meminta KPU RI membuka hasil audit forensik tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Minggu (18/2), KPU RI memerintahkan kepada seluruh KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menunda rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu 2024 di tingkat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kemudian, dijadwalkan ulang menjadi Selasa (20/2).

PDI Perjuangan menilai Sirekap sebagai alat bantu dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta proses rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara di tingkap PPK adalah dua hal yang berbeda. Sehingga penundaan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK menjadi tidak relevan.

PDI Perjuangan menyampaikan permasalahan Sirekap sebagai alat bantu harus segera ditindaklanjuti dengan mengembalikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara manual berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara C.Hasil. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebelumnya, Senin (19/2), anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos membenarkan bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak dapat mengoreksi hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang salah terbaca oleh Sistem Rekapitulasi Informasi (Sirekap). "Untuk perolehan suara pilpres, memang KPPS hanya dapat memberikan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai hasil pembacaan Sirekap," ungkapnya.

Betty menjelaskan, koreksi data yang tidak sesuai dilakukan KPU kabupaten/kota melalui mekanisme Sirekap web (https://sirekap-web.kpu.go.id), sementara sistem dapat membacanya jika terjadi ketidaksesuaian. Sirekap adalah sebuah sistem informasi yang telah dirancang untuk memastikan kontrol, pemantauan, dan keamanan data yang terjaga. KPU membantah klaim bahwa sistem ini bisa dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, dan menggarisbawahi bahwa penggunaannya telah memberikan dukungan yang besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi. **(Ant/Has)-f**

Peduli

Sambungan hal 1

Aktivitas manusia dan industri yang semakin padat tak bisa dipungkiri berdampak pada meningkatnya volume sampah di lingkungan. Pekerjaan rumah (PR) terkait pengelolaan sampah seakan tak ada habisnya. KLHK melaporkan berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022, dari jumlah timbunan sampah yang mencapai 21,1 juta ton hasil inputan 202 kota/kabupaten se-Indonesia, 13,9 juta ton (65,7%) telah terkelola dengan baik dan sisanya 7,2 juta ton (34,3%) belum terkelola dengan baik. Dari angka tersebut, menurut SWI (sustainable waste Indonesia), 3,2 juta tonnya merupakan sampah plastik. Hal ini menunjukkan belum selesai dengan problem jumlah sampah yang luar biasa besar, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah (PR) berkaitan dengan jenis sampah plastik di lingkungan. Karenanya tema HPSN tahun ini yang diambil oleh KLHK adalah ëAtasi sampah plastik dengan cara produktifí sebagai wujud perhatian besar berkaitan problem laten persampahan di Indonesia.

Banyaknya sampah akan terus menjadi pekerjaan rumah manakala pendekatan pengelolaannya tidak dilakukan secara komprehensif. UU nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan jelas memberikan mandat di pasal 4 bahwa tujuan dari pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka perbaikan tiga aspek: a) untuk meningkatkan kesehatan masyarakat; b) peningkatan kualitas lingkungan; serta c) menjadikan sampah sebagai sumber daya. Ketiga tujuan utama tersebut bisa tercapai manakala aspek hulu dan hilir dalam manajemen sampah dilakukan secara sinergis.

Aspek hulu seharusnya mampu mencegah atau mengurangi produksi sampah melalui upaya misalnya peningkatan budaya makan dan belanja secukupnya di level keluarga, hingga pengurangan penggunaan kantong plastik dalam aktivitas belanja harian dan mingguan. Kebiasaan lama ëkumpul-angkut-buangí harus bertransformasi menjadi budaya baru pilah sampah sedari rumah hingga gaya hidup 3R (*reduce, reuse and recycle*).

Hal lainnya adalah pemanfaatan sampah organik dari sisa makanan dan aktivitas rumah tangga menjadi pupuk cair dan biogas bisa menjadi alternatif lain sebagai perwujudan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Ada banyak cara sederhana pengelolaan sampah rumah tangga berskala kecil yang bisa dipraktikkan di masyarakat.

Peran pemerintah dan institusi negara tentu penting. Diharapkan, momentum pergantian kepemimpinan nasional 2024 baik di ranah eksekutif maupun legislatif menjadi darah dan semangat baru pada realisasi visi-misi kampanye menjadi program sistemik dalam penanganan sampah secara nasional.

(Penulis adalah dosen dan Peneliti Minat Lingkungan FMIPA UGM)-d

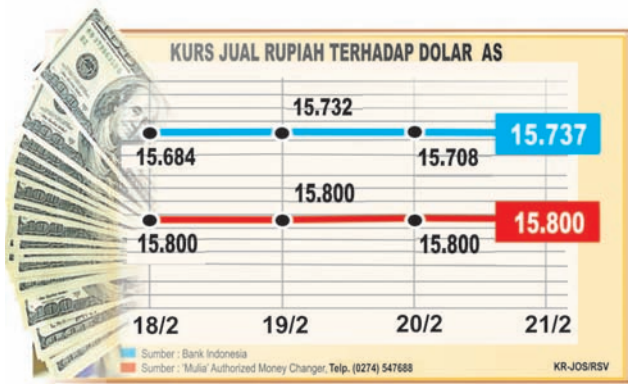

Prakiraan Cuaca Kamis, 22 Februari 2024

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Peran Green Economy Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Dr Ismadiyanti Purwaning Astuti, SE MSc
Dosen Prodi Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Sosial
Universitas Amikom Yogyakarta

PERMASALAHAN polusi, perubahan iklim, pemanasan global, kelangkaan sumber daya alam dan mineral secara massif dilakukan oleh perseorangan, perusahaan maupun pemerintah. hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Kondisi ini harus kita sikapi dengan melakukan pembangunan ekonomi yang tetap menjaga kondisi lingkungan tetap lestari atau dapat dimanakan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan adalah melakukan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan sosial dan perlindungan lingkungan. Pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan akan berdampak positif pada lingkungan. Pada dasarnya, sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kondisi alam dan lingkungan akan menyebabkan masalah dikemudian hari.

Konsep pembangunan berkelanjutan sudah muncul beberapa decade lalu. Pembangunan berkelanjutan ini sudah dimulai sejak tahun 1798 oleh Malthus dikarenakan kekhawatiran ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang pesat. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memperbaiki mutu kehidupan masyarakat dengan tetap berusaha menjaga ekosistem pendukung kehidupannya.

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan pembangunan antar generasi di masa kini maupun masa mendatang. Menurut Kajian Lingkungan hidup, pengukuran pembangunan keberlanjutan berdasarkan tiga kriteria, yaitu tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam, tidak ada dampak polusi dan lingkungan dan kegiatannya harus meningkatkan penggunaan sumber daya. Selain itu, ada tiga alasan pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, alasan moral dimana generasi kini dan akan datang dapat menghasilkan barang dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam secara moral. Kedua, alasan ekologi dimana keanekaragaman hayati yang memiliki nilai ekologi yang sangat tinggi harus memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat melestarikan fungsi ekologi. Ketiga, alasan ekonomi dimana aktifitas ekonomi harus memenuhi kriteria keberlanjutan yang cukup komplek dalam peningkatan kesejahteraan.

Salah satu strategi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah ekonomi hijau atau green economy. Ekonomi hijau merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang tidak mengabaikan berbagai aspek lingkungan sehingga tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dengan kata lain, ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi hijau dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial.

Kegiatan yang menganut ekonomi hijau mencoba melakukan pembatasan dalam penggunaan berbagai sumber daya alam. Kegiatan ekonomi yang menggunakan sistem rendah karbon sehingga mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dan makhluk hidup. Ekonomi hijau yang lihat dari pandangan ekonomi harus mengacu pada proses bisnis dan infrastruktur untuk menghasilkan keuntungan dan infratruktur yang lebih baik untuk investasi modal alam, manusia dan ekonomi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan menggunakan sedikit sumber daya alam, menghasilkan sedikit limbah dan mengurangi kesenjangan sosial.

Perkembangan konsep ekonomi hijau menjadi paradigma dalam pembangunan berkelanjutan yang penting dalam menggulangi dampak perubahan iklim yang terjadi. Pembangunan berbasis ekonomi hijau merupakan keniscayaan dimana mengingat semakin tidak terkendalinya kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Paradigma pembangunan harus berubah menjadi lebih menggunakan energi secara efisien dan secara sosial harus menuju ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. ***

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park